

ABSTRAK

Karya tulis tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan peninjauan atas kepatuhan perpajakan oleh Bendahara Desa Margorejo serta cara KPP Pratama Pati dan Desa Margorejo mengatasi hambatan-hambatan dalam perpajakannya, khususnya yang terkait dengan PPh Pasal 22. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data-data diambil dari Desa Margorejo dan KPP Pratama Pati melalui wawancara kepada orang yang terkait dan dokumen perpajakan yang telah diarsipkan oleh Desa Margorejo. Hasil peninjauan menunjukan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Desa Margorejo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, Bendahara Desa Margorejo beberapa kali masih tidak melaporkan pajak yang dipungutnya tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan fokus dari KPP Pratama Pati yang memberikan keringanan dalam pelaporan kepada para bendahara desa dengan tidak memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan. Hambatan yang dialami oleh bendahara desa adalah kurangnya pemahaman mengenai perpajakan bagi lawan transaksinya sehingga menyebabkan lawan transaksi tidak terbuka atas kewajiban perpajakannya. Solusi yang diambil adalah berkaitan dengan komunikasi antara Bendahara Desa Margorejo dan KPP Pratama Pati untuk berkoordinasi memberikan pemahaman pajak bagi warganya serta pemanfaatan aplikasi SISKEUDES untuk penghitungan pajak oleh Bendahara Desa Margorejo.

Kata kunci: PPh Pasal 22, Kepatuhan, Hambatan, Ketidakterbukaan

ABSTRACT

This final project paper aims to review tax compliance by the Treasurer of Margorejo Village and how KPP Pratama Pati and Margorejo Village overcome obstacles in their taxation, especially those related to Income Tax Article 22. To achieve this goal, the researcher uses a qualitative method, namely through library research and field studies. The data was taken from Margorejo Village and KPP Pratama Pati through interviews with related people and tax documents that have been archived by Margorejo Village. The results of the review show that the collection of Article 22 PPh carried out by the Margorejo Village Treasurer is in accordance with the applicable laws and regulations. However, the Treasurer of Margorejo Village several times still does not report the taxes he collects on time. This is related to the focus of KPP Pratama Pati which provides relief in reporting to village treasurers by not providing sanctions for late reporting. The obstacle experienced by the village treasurer is the lack of understanding of taxation for the transaction opponent, causing the transaction opponent to not be open to his tax obligations. The solution taken is related to communication between the Margorejo Village Treasurer and the KPP Pratama Pati to coordinate providing tax understanding for its citizens and the use of the SISKEUDES application for tax calculations by the Margorejo Village Treasurer.

Keywords: Income Tax Article 22, Compliance, Obstacles, Non-disclosure